



Desak BPK Audit PLN

PONTIANAK - DPRD Kota Pontianak mendesak Badan Pemeriksaan Keuangan untuk mengaudit Perusahaan Listrik Negara Cabang Pontianak yang kerap melakukan pemadaman listrik selama Ramadan.

Wakil rakyat pun meminta Polda Kalimantan Barat untuk memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap indikasi penyalahgunaan dan pengeluwengan pasokan solar yang dilakukan PLN selama terjadi pemadaman listrik.

Seperti yang terjadi kemarin malam, PLN kembali melakukan pemadaman listrik di wilayah Sungai Raya Dalam Kecamatan Pontianak Tenggara sekitar pukul 21.00. bahkan sebelumnya, di Kecamatan Pontianak Kota pemadaman dilakukan di saat sebagian warga tengah melaksanakan ibadah solat tarawih.

Anggota DPRD Kota Pontianak Muhammad Fauzi mengatakan pihaknya sangat menyesalkan dan menyayangkan kebijakan pemadaman listrik yang dilakukan PLN, di waktu-waktu seperti saat berbuka puasa. "Alasan yang disampaikan PLN, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah hanya itu-itu saja," katanya, Selasa (22/7).

Dia menegaskan dewan sudah tidak kuasa memanggil PLN untuk melakukan rapat kerja, karena pasti alasan yang disampaikan terkait pemadaman listrik karena layanan, kerusakan mesin, atau perawatan. "Kami sudah apatis dengan PLN, rapat berkali-kali pun pemadaman terus dilakukan," ucapnya.

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Desak BPK Audit PLN

sambungan dari halaman 16

Yang jelas, lanjut dia, kebijakan pemadaman listrik yang dilakukan PLN selama Ramadan sangat tidak masuk akal. "Maka dari itu, kami dewan berharap BPK Perwakilan Kalbar untuk dapat segera melakukan audit terhadap PLN, termasuk Ombudsman dan YLKI kami minta untuk memprotes kinerja PLN Cabang Pontianak yang tidak becus menyediakan pasokan listrik bagi masyarakat," tegasnya. Dia menuturkannya Polda Kalbar pun perlu campur tangan untuk melakukan

pengawasan terhadap PLN agar tidak ada penyelewengan dan penyimpangan pasokan minyak.

"Yang perlu diselidiki kepolisian, selama pemadaman listrik terjadi pasokan Solar yang tidak digunakan oleh PLN dikemanakan. "Kalau memang ada indikasi penyimpangan, maka kami meminta kepada penegak hukum untuk menangkap dan memproses penanggungjawab PLN," tegasnya kembali.

Yang jelas, dia menambahkan warga Kota Pontianak sudah gerah dengan pemadaman listrik namun

masih saja selalu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. "Banyak aspirasi masyarakat yang mengajak untuk mendemo PLN, tapi kami masih mencoba berusaha menenangkan mereka," pungkasnya.

Yang patut dipertanyakan dan menimbulkan pertanyaan, dia menuturkan pemadaman listrik yang dilakukan PLN hanya dilakukan di kawasan pemukiman masyarakat saja. Sementara kawasan industri, pusat perdagangan modern sangat jarang merasakan pemadaman listrik. (adg)